

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Boen, H. S. 2018. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa.
- C.S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya paramita.
- Dirjosisworo, S. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan Usaha) di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Dwidja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung. Cv. Utomo.
- Fajar, M dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya bakti.
- Hamza I, A. 2005. *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, T. K., Hasan, M. et al. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesatu*. Makasar. Tahta Media Group.
- Ibrahim, J. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya. Bayumedia.
- Marzuki, P. M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Saidi, M. D. dan Djafar, E. M. 2017. *Hukum keuangan Negara teori dan praktik*. Depok. Raja Grafindo.
- Sjawi, H. R. 2015. *Direksi Dan Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Sumardjono, M. S. W. 2014. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Suparji. 2015. *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. UAI Press.
- Tim Kelompok Kerja Penyusunan Perma Pidana Korporasi. 2017. *Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta. Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Widjaya, I. G. R. 2000. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: KBI.

Wijaya, F. 2008. *Pengadilan Korupsi Teori dan Praktek*. Jakarta. Penaku & Maharini Press.

Yani, A. & Widjaja, G. 2006. *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.

JURNAL

Arifin. M. Z. dan Muntaqo. F. 2018. Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Jurnal Nurani*. Vol. 18. No. 2.

Binangkit, K. C. 2020. Kasus Jiwasraya dan Asabri: Mengoptimalkan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Mekanisme Penilaian/Penetapan Pada Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK. *Warta Pemeriksa*. Vol. III. Edisi 5.

Budi Harianto, 2025, Kerugian keuangan Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal pengabdian masyarakat dan Riset pendidikan*, Vol. 03 No. 04.

Candra, S. 2013. Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 No. 1.

Dahoklory, M.D. 2020. Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal “Dilema” Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis, *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 9 No. 3.

fadlian. A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 2. No. 2

Firmansyah, A. Machmud, A. dan Suparji (2024). Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi, *Binamulia Hukum*. Vol. 12. No. 2.

Firmansyah, A. Machmud, A. dan Suparji. 2024. Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi, *Binamulia Hukum*. Vol. 12. No. 2.

Fitriyanti, F. P. 2022. Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan teori Transformasi Keuangan Dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7. No. 8.

Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel. 1989. The corporate contract. (Contractual Freedom in Corporate Law”. *Columbia Law Review*. Vol. 89. No. 7.

Gunatri. D. N. A dan Sukihana. I. A. 2019. Akibat Hukum Pengetahuan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan. *Kertha Semaya*. Vol. 7. No. 3.

- Jovico, A.G. Syukri, W. *et al*, 2025. Tanggungjawab Direksi Terhadap Kerugian Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. *Legalitas Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 10. No.1.
- Khairandy, R. 2013. Karakter Hukum Perseroan dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 1 Vol.20.
- Pamela L. Hu. & Russell C. Silberglied. 2007. From Production Resources to Peoples Department Stores: A Similar Response by Delaware and Canadian Courts on the Fiduciary Duties of Directors to Creditors of Insolvent Companies”. *Journal of Business and Technology Law*. Vol. 1. No. 2
- Pradipta. F. S. dan Widjajanti. E. 2025. Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No.1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 4 Issue 2.
- Rahmad Alan Kurniawan, Fitrahul Alwi, dkk, 2025, Analisis Delik Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan BUMN Oleh Pejabat Direksi BUMN, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi, dan Teknologi*, Vol. 2 No. 3.
- Rasji. Yuniati. dan Zayyan Syafiqah Aggistri. 2024. Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Filosofi Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5 No.10.
- Sandi, M.Y. Muhjad, M. H. dan Syaufi, A. 2023. Kekayaan negara Yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero, *Notary Law Journal*. Vol 2. No.3.
- Setiawan, A. D. dan Vitrana, M. G. 2025. Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam UU BUMN: Batas Tanggung jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechtsens*. Vol. 14. No.1.
- Sudarna. 2025. Penerapan *Business Judgment Rule* Terkait dengan Keputusan Direksi PT BUMN. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 3.
- Vasudev. P.M. 2014. Corporate Stakeholders in Canada—An Overview and a Proposal”. *Ottawa Law Review*. Vol. 45. No. 1.
- Wuisang, A. 2015. Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Perdata Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Oleh Pemerintah. *Pakuan Law Review*. Vol. 1. No. 2.
- Yurus, N. R. dan Nasution, L. 2021. Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada BUMN Dengan Prinsip *Business Judgment Rule*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 16. No. 2.

INTERNET

6 Supreme Court of Delaware. "Supreme Court of Delaware Aronson v. Lewis. 473 A.2d 805. 812 (Del. 1984)" Decided: March 1. 1984. IV. <https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1984/473-a-2d-805-4.html>. Diakses pada 22 Juni 2024 Pukul 16.31 WIB.

Ilham, R.O. dan Dewi, D, C. Seminar Nasional UGM Bahas Implikasi Revisi UU BUMN terhadap Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi, *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, <https://law.ugm.ac.id/seminar-nasional-ugm-bahas-implikasi-revisi-uu-bumn-terhadap-tata-kelola-dan-pencegahan-korupsi/>, Diakses pada 20 Oktober 2025.

Akmalia, F. dan Syamsudi, M. R. 2025. *Pergeseran Makna Kekayaan BUMN dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Direksi BUMN*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pergeseran-makna-kekayaan-bumn-dan-implikasinya-terhadap-pertanggungjawaban-direksi-bumn-lt67b9e73c2e590/>. Diakses pada 01 Juli 2025.

ANT. 2017. *Ini Poin Penting PP Penyertaan Modal Negara Bagi BUMN*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-pp-penyertaan-modal-negara-bagi-bumn-lt5878d05720044/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2025.

BUMN. *Penyertaan Modal Negara*. <https://bumn.go.id/prioritas/prioritas/Penyertaan%20Modal%20Negara>. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.

CNN Indonesia. (2024). Eks Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Dituntut 12 Tahun Penjara. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241205164131-12-1174156/eks-dirut-pt-timah-mochtar-riza-pahlevi-dituntut-12-tahun-penjara>. Diakses pada 15 Maret 2023.

Hukum Online. 2013. *Wilyah Abu-Abu BUMN Dalam UU Keuangan Negara*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wilayah-abu-abu-bumn-dalam-uu-keuangan-negara-lt51f136bae1eef/?page=1>. Diakses pada 01 Juli 2025.

Kerr v. Danier Leather Inc. (2007). SCC 44 (CanLII). [2007] 3 SCR 331. Paragraph 56. Putusan ini dapat dilihat di [1998 CanLII 5121 \(ON CA\) | Maple Leaf Foods Inc. v. Schneider Corp. | CanLII](#). Diakses pada 22 Juni 2025. Pukul 16.58 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi. TPK Pengadaan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Pada PT Pertamina Persero Tahun 2011-2021. *KPK*. <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-pengadaan->

[liquefied-natural-gas-lng-pada-pt-pertamina-persero-tahun-2011-2021.](#)

Diakses pada 13 Maret 2025

Max Ki. *Memahami Esensi Perbedaan Antara Kalimat Deduktif dan Induktif*. JNews UMSU. (2023) <https://umsu.ac.id/berita/memahami-esensi-perbedaan-antara-kalimat-deduktif-dan-induktif/>. Diakses pada 08 Juni 2024. Pukul 20.00 WIB.

Mulya. F. P. 2025. MA Perberat Vonis eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Jadi 13 Tahun. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4679973/ma-perberat-vonis-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-jadi-13-tahun>. Diakses pada 13 March 2025

Pramudya A. Oktaviananda. 2025. dalam Seminar Nasional UGM Kampus Jakarta bertajuk *Danantara Quo Vadis Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Realitas Pengembangan Bisnis BUMN*. <https://www.youtube.com/watch?v=oUsey-m6qk>. Diakses pada 14 Agustus 2025.

Putri. T. A Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas. *Hukum Online*. 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-direksi-perseroan-terbatas-lt4fd98a998caec/>. Diakses pada 13 April 2025.

Wahyuni dan Willa. 2023. *Implementasi Business judgment rule Yang Dapat Dipidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-business-judgement-rule-yang-dapat-dipidana-lt650c0c499fa5b/#!>. Diakses pada 24 Maret 2024. pukul 21.50 WIB

Wikipedia. 2024. *Aturan Penilaian Bisnis*. https://en.wikipedia.org/wiki/Business_judgment_rule. Diakses Pada 24 Maret 2024. Pukul 22.00 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Canada Business Corporation Act 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang tata cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan terbatas

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

LAIN-LAIN

Cornelius F.B. Rangga A. W. Muhammad Irfan K. (2025). Eksistensi BUMN Dalam Sistem Perekonomian Nasional: Antara Amanat Konstitusi Dan Dinamika Pasar. *Makalah Ilmu Hukum UNS*.

Rajagukguk, E. 2006. *Pengertian Keuangan Negara dan kerugian Negara*. Disampaikan pada diskusi publik “Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi” Komisaris Hukum Nasional (KHN) RI.